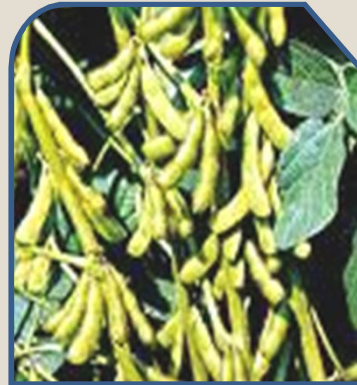


RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2012



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Jakarta, 2011

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jl. AUP Nomor 3, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Telpon Kantor: 021-7805269
Fax Kantor: 021-7827145
Email: bagcanditjntp@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga, unit organisasi eselon I, dan unit kerja eselon II harus menyusun Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja (PK). Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 disusun sebagai hasil penelaahan atas capaian tujuan yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2014.

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan meliputi 8 (delapan) kegiatan: (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; (2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, (3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; (4) Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan; (5) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI); (6) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih; (7) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan; serta (8) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Program dan kegiatan ini merupakan aktifitas seperti tahun sebelumnya.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 ini disusun sebagai acuan penyusunan kegiatan dan anggaran tahun 2012.

Jakarta, Juni 2011
Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Udhoro Kasih Anggoro
Nip. 195611061984031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	5
2.2 Direktorat Budidaya Serealia	5
2.3 Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	6
2.4 Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.....	6
2.5 Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan	7
2.6 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	8
2.7 Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH)	8
2.8 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT).....	9
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI..	11
3.1 Visi	11
3.2 Misi.....	11
3.3 Tujuan	12
3.4 Sasaran	12
3.5 Kebijakan	13
3.6 Strategi	17
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	21
4.1 Program	27
4.2 Kegiatan	31
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2012.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2012	13
Tabel 2	Perkembangan Program dan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2011	22
Tabel 3	Alokasi Anggaran Per Program dan Per Jenis Belanja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2011	25
Tabel 4	Komponen Prioritas Pemberdayaan dan Penguatan Program/Kegiatan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012	29
Tabel 5	Rencana Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Melalui SLPTT dan Lokasi Pengembangan Melalui APBN TA 2012.....	30
Tabel 6	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012.....	34
Tabel 7	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Budidaya Serealia Tahun 2012	36
Tabel 8	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2012	38
Tabel 9	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Tahun 2012	40
Tabel 10	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012	41
Tabel 11	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012	42
Tabel 12	Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012	43
Tabel 13	Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun 2012	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Strategi dan Empat Sukses Kementerian Pertanian.....	18
Gambar 2	Catur Strategi Pencapaian Produksi Tanaman Pangan.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2012	47
Lampiran 2	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2012	48
Lampiran 3	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Tahun 2012	49
Lampiran 4	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2012	50
Lampiran 5	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2012	51
Lampiran 6	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2012	52
Lampiran 7	Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2012	53
Lampiran 8	Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, tanggal 14 Oktober 2010).....	54
Lampiran 9	Daftar Komoditi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006,tanggal 12 September 2006)	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), pembangunan dilaksanakan dalam koridor jangka menengah. Periode Tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian melaksanakan 12 (dua belas) program, yang dilaksanakan oleh 12 unit Eselon I, dimana setiap unit Eselon I melaksanakan 1 (satu) program. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan memiliki 8 (delapan) kegiatan yaitu: (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; (2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; (3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; (4) Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan; (5) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; (6) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih; (7) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan (8) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Subsektor tanaman pangan memiliki keragaman komoditas yang cukup banyak untuk dapat ditumbuhkembangkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Daftar Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Perkebunan, dimana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki 36 komoditi tanaman pangan sebagai tanggung jawab binaan.

Namun demikian, karena faktor keterbatasan yang ada, arah dan kebijakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan diprioritaskan pada:

- 1) Komoditi utama dan unggulan nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditi ini merupakan komoditi utama dan unggulan bagi kebutuhan pangan pokok nasional.
- 2) Komoditi alternatif/unggulan daerah (lokal) seperti talas, garut, gembili, sorgum, gandum dan lain-lain. Komoditi ini sebagai substitusi maupun komplemen dari komoditas utama dan unggulan nasional.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2012 adalah Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Tema ini merupakan landasan dalam menyusun rancangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Pada prinsipnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Indikator kinerja yang menentukan keberhasilan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan adalah terjadinya peningkatan produksi, produktivitas dan luas panen dari komoditas Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Peningkatan produksi itu untuk Padi 72,03 juta ton GKG, Jagung 24,00 juta ton pipilan kering, Kedelai 1,90 juta ton biji kering, Kacang Tanah 1,10 juta ton biji kering, Kacang Hijau 0,39 juta ton biji kering, Ubi Kayu 25,00 juta umbi basah, dan Ubi Jalar 2,30 juta umbi basah.

Untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan tepat waktu serta efisien dan efektif, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan. Dalam hal ini, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun 2012 dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dari unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010 - 2014.

1.2 Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 ini merupakan acuan dasar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yang ditetapkan serta dalam menyusun anggaran program/kegiatan TA 2012 bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen dan administrasi.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, secara struktural membawahi 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 (lima) Direktorat dan 2 (dua) Balai Besar sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
2. Direktorat Budidaya Serealia;
3. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi;
4. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan;
5. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan;
6. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan;
7. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
8. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat, Direktorat dan Balai Besar adalah sebagai berikut :

2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Fungsi :

- a. koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2.2 Direktorat Budidaya Serealia

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya serealia.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealialia lain;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealialia lain; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Serealialia.

2.3 Direktorat Budidaya Aneka Kacang Dan Umbi

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya aneka kacang dan umbi.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi.

2.4 Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih sereal, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih sereal, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih sereal, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih sereal, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

2.5 Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman pangan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan sereal lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan sereal lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang padi, jagung dan sereal lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung dan sereal lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

2.6 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

2.7 Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Tugas :

Melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih;
- b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan uji banding (uji profisiensi, untuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
- e. pelaksanaan sertifikasi benih untuk tujuan ekspor (*Orange, Green and Blue Certificate*);
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan Sertifikasi Sistem Mutu dan pemberian hak penandaan SNI pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih dan pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

2.8 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Tugas :

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan

- peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT);
 - d. pelaksanaan perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP);
 - g. pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Visi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai Visi Tahun 2010-2014, yaitu "Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Cukup dan Berkelanjutan".

3.2 Misi

- a. Mewujudkan birokrasi tanaman pangan yang profesional dan berintegrasi;
- b. meningkatkan perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan;
- c. mengembangkan sistem penyediaan benih yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan;
- e. meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan;
- f. mendorong peran serta instansi dan *stakeholder* terkait serta masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan.

Tugas:

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang tanaman pangan.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3.3 Tujuan

- a. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan;
- b. menyelenggarakan sistem penyediaan benih tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, dan tersalurinya benih tanaman pangan bersubsidi;
- c. meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat;
- d. mengendalikan serangan OPT dan DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hasil tanaman pangan;
- e. menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- f. menciptakan metoda pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan;
- g. menyediakan informasi dan menciptakan model peramalan OPT sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan.

3.4 Sasaran

Sasaran utama pembangunan tanaman pangan tahun 2010-2014 merupakan turunan dari sasaran utama pembangunan pertanian yaitu: a) mewujudkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, b) mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, c) mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta d) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran ini disebut dengan **Empat Sukses Kementerian Pertanian**. Pencapaian keempat sasaran (target) utama diharapkan dapat memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan nasional dan ketahanan pangan nasional, baik kebutuhan pangan, kebutuhan pakan, kebutuhan energi maupun kebutuhan

bahan baku untuk industri lainnya. Selain itu, dampak kinerja pembangunan tanaman pangan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan negara.

Pencapaian Empat Sukses Kementerian Pertanian tersebut memerlukan keterpaduan pelaksanaan program baik lingkup Kementerian Pertanian maupun lintas Kementerian/Pemerintahan. Fungsi dari program pemerintah hanya berupa stimulan untuk menggerakkan kekuatan ekonomi tanaman pangan secara nasional. Dalam hal ini, pembangunan tanaman pangan dikelompokkan pada pengembangan komoditas utama dan komoditas alternatif. Namun demikian, penetapan sasaran produksi hanya dilakukan pada komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu. Sasaran produksi komoditas utama tanaman pangan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2012

Komoditas	Luas Tanam(Ha)	Luas Panen(Ha)	Produktivitas (ku/Ha)	Produksi (Ton)
Padi	14.026.771	13.556.865	53,13	72.026.235
Jagung	4.874.437	4.655.430	51,55	24.000.000
Kedelai	1.312.000	1.250.000	15,20	1.900.000
Kacang Tanah	825.000	785.700	14,00	1.100.000
Kacang Hijau	342.600	325.500	11,98	390.000
Ubi Kayu	1.381.600	1.315.800	190,00	25.000.000
Ubi Jalar	207.000	196.700	117,00	2.300.000

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014
(untuk rincinya per provinsi dapat dilihat pada lampiran 1 sd 7)

3.5 Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sekaligus merupakan rangkaian lanjutan dari RKP tahun 2011.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2012 adalah Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Tema ini merupakan landasan dalam menyusun rancangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Pada prinsipnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Kementerian Pertanian menetapkan 23 (dua puluh tiga) arah kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2010-2014. Dari 23 arah kebijakan tersebut, 9 (sembilan) diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu: (1) melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain: bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT); (2) melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), (3) pemantapan swasembada beras dan jagung melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan, (4) pencapaian swasembada kedelai, (5) pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani, (6) penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional, (7) peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu, (8) berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta (9) peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance*.

Secara operasional, kebijakan pembangunan tanaman pangan diprioritaskan pada 1) pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung, 3) pencapaian swasembada kedelai tahun 2014, 3) pengembangan komoditas spesifik lokasi di Kawasan Timur (Direktif Presiden), 4) penguatan pangan nasional berbasis Koridor MP3I, serta 5) pengembangan produksi di kawasan-kawasan khusus lainnya seperti kawasan perbatasan dan kawasan agropolitan.

Optimalisasi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tanaman pangan perlu didukung oleh iklim berusaha yang kondusif. Dalam hal ini, dukungan kebijakan yang berpengaruh terhadap iklim usaha atau pengembangan agribisnis tanaman pangan harus diperhatikan antara lain:

(1) Harga

Kegiatan usahatani dari suatu komoditas dapat berjalan apabila petani memperoleh insentif/keuntungan yang memadai. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan pasar hasil tanaman pangan sepanjang tahun melalui penetapan harga pembelian oleh pemerintah, khususnya komoditas strategis seperti padi, jagung dan kedelai. Pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari ulah spekulasi pedagang yang dapat memainkan harga. Selain itu perlu mengupayakan tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara petani dengan pedagang/industri olahan/pengusaha lainnya. Dalam pengendalian harga tersebut diperlukan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait, baik pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota maupun tingkat pusat.

(2) Bea Masuk

Dalam era globalisasi dewasa ini persaingan pasar antar komoditas tanaman pangan semakin ketat. Komoditas tanaman impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan agribisnis tanaman pangan dalam negeri. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang baik serta dengan kontinuitas pasokan yang terjamin. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut di atas, pemerintah Indonesia melindungi petaninya melalui pemberlakuan bea masuk (tarif) impor. Pemberlakuan tarif impor tersebut masih dimungkinkan dalam kerangka kebijakan *World Trade Organization*

(WTO). Untuk mengatasi penyelundupan produk-produk tanaman pangan dilakukan koordinasi dalam pengawasan pintu-pintu masuk penyelundupan barang-barang dari luar negeri.

(3) Karantina Tumbuhan

Indonesia sangat kaya akan berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis tumbuhan, hewan, ikan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya dari berbagai hama, penyakit dan organisme pengganggu. Oleh karena itu untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit hewan/ikan melalui media pembawa (tumbuhan dan bagian-bagiannya, hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan/atau benda lainnya) dari luar negeri atau dari area lain di dalam negeri, perlu pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas karantina.

Pada era perdagangan bebas ini, karantina merupakan suatu instrumen yang penting untuk memperlancar arus perdagangan, baik ekspor maupun impor. Dengan adanya peraturan karantina yang selaras dengan aturan sanitasi dan fitosanitari (*sanitary and phytosanitary/SPS regulation*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk ekspor impor yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan taraf hidup petani. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya tuntutan terhadap produk Indonesia di luar negeri akibat buruknya mutu. Demikian juga derasnya arus masuk produk luar negeri yang tidak bermutu dapat dicegah melalui pengawasan karantina.

Untuk menjaga masuknya produk-produk pertanian tanaman (termasuk benih) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan hama dan penyakit serta lingkungan, maka perlu pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas karantina. Penjagaan dari aspek hama dan penyakit serta lingkungan tersebut di atas meliputi keamanan jangka pendek sampai dampak dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu koordinasi dengan pihak karantina setempat perlu dilakukan dan lebih ditingkatkan.

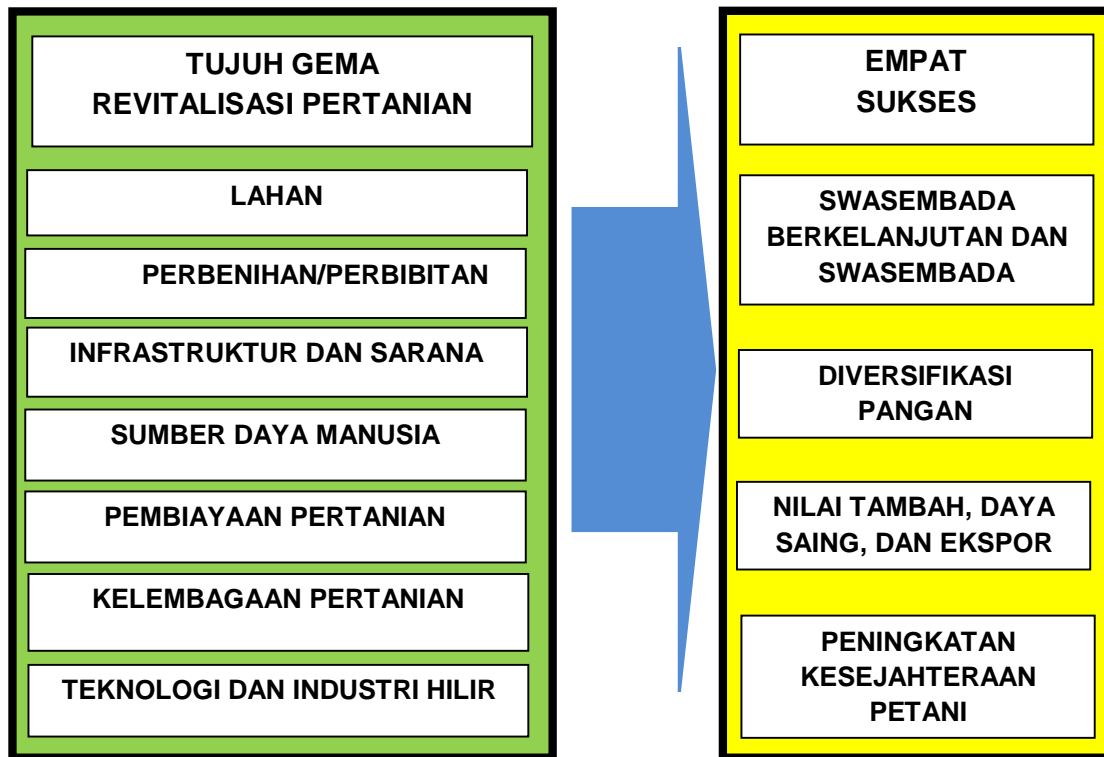
(4) **Pengendalian Alih Fungsi Lahan**

Meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya ekonomi serta industri, berakibat terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional. Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian/non-tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i) mewujudkan revitalisasi pertanian. Sanksi bagi orang, perseorangan, pejabat pemerintah yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2-5 tahun dan denda berkisar antara satu milyar rupiah sampai tujuh milyar rupiah.

3.6 Strategi

Pencapaian sasaran pembangunan tanaman pangan akan ditempuh melalui strategi **Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian** yaitu: (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; serta (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.



Gambar 1. Hubungan Strategi dan Empat Sukses Kementerian Pertanian

Ketujuh strategi pembangunan pertanian tersebut akan mempengaruhi tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Namun demikian, harus disadari bahwa ketujuh strategi tersebut melibatkan institusi pemerintah lainnya dan institusi non pemerintah. Untuk mewujudkan pencapaian Empat Sukses tersebut, orientasi peningkatan produksi menjadi alat (instrumen) utama yang diprioritaskan. Untuk itu, sebagai jaminan tambahan bagi petani atau pelaku usaha pertanian, pemerintah memberikan stimulan baik berupa bantuan, subsidi ataupun insentif lainnya. Pemberian ini sebagai bagian dari meringankan biaya usaha dan sekaligus meningkatkan pendapatan.

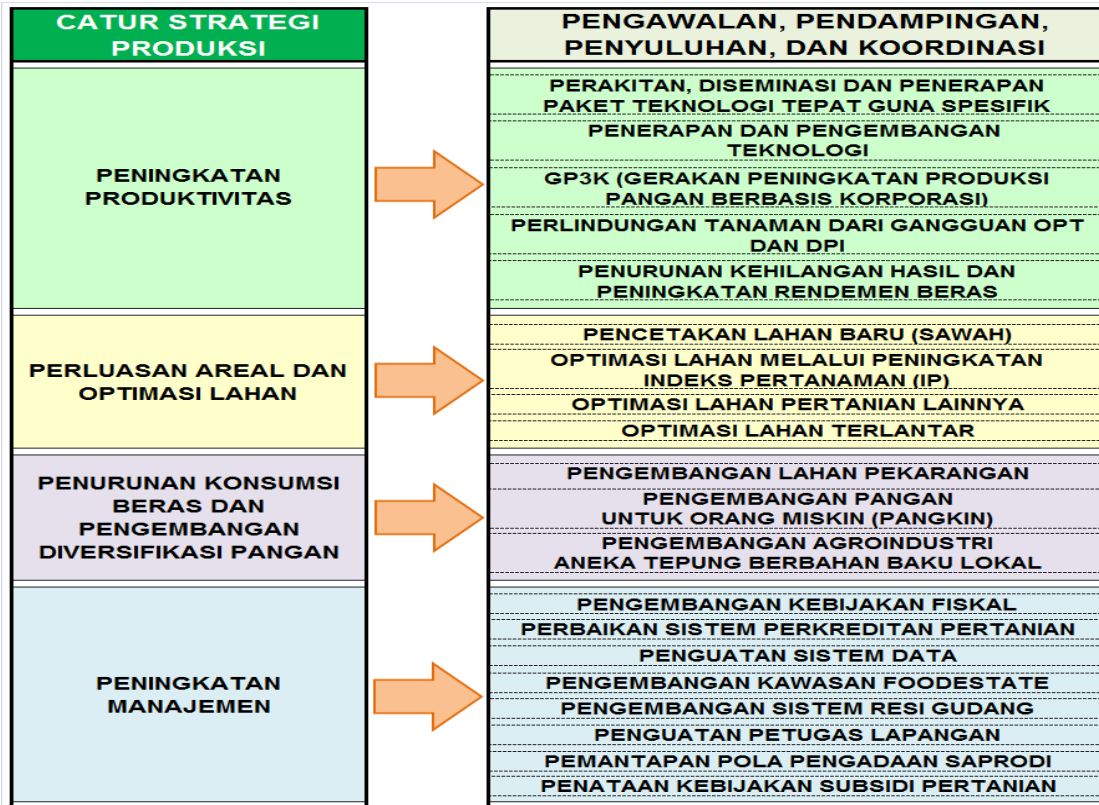
Secara harfiah, peningkatan produksi diharapkan dapat memacu peningkatan pendapatan. Berkaitan dengan peningkatan produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan strategi pencapaian produksi tanaman pangan melalui empat strategi atau disebut dengan **Catur Strategi Pencapaian Produksi Tanaman Pangan** yaitu:

1. Peningkatan produktivitas
2. Perluasan areal dan optimasi lahan

3. Penurunan konsumsi beras dan pengembangan diversifikasi pangan
4. Peningkatan manajemen.

Catur strategi pencapaian produksi tanaman pangan ini merupakan penajaman sekaligus revisi atas catur strategi yang selama ini digunakan yaitu 1) peningkatan produktivitas, 2) perluasan areal tanam, 3) pengamanan produksi, dan 4) penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai proses penegasan dan respon atas perubahan lingkungan yang terjadi.

Proses penajaman dan revisi terhadap strategi pencapaian produksi tanaman pangan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan program pembangunan tanaman pangan dan aspek keterpaduan baik disisi hulu, *on-farm*, maupun hilir.



Gambar 2. Catur Strategi Pencapaian Produksi Tanaman Pangan

Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah:

1. Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan nasional;
2. mengamankan kehilangan (susut) hasil produksi; dan
3. mengamankan potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Selama periode tahun 2010 – 2014 pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami perubahan (revisi), seiring dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014 (edisi revisi) pada Desember 2011. Perkembangan fase perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perkembangan Program dan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2011

No.	Tahun	Program	Kegiatan	Rencana Alokasi Anggaran Renstra (Milyar Rp)	Alokasi Anggaran (Milyar Rp)
1.	2010	1. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	1. Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas	892,35	892,37
			2. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan, dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis		
		2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan		
			4. Bantuan Benih, Sarana Produksi dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan		
			5. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen		
			6. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian		
		3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	7. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3)		

		4. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	8. Penerapan dan Pemanfaatan Prinsip <i>Good Governance</i> 9. Gaji, Honor, Tunjangan, Operasional Kantor dan Pemeliharaan Perkantoran		
2.	2011	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1. Dukungan Manajemen, dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 3. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 4. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 5. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 6. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 7. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih 8. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	1.086,65	2.258,71

Sedangkan perkembangan alokasi anggaran tahun 2010 – 2011 di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Tahun 2010 – 2011 Per Program dan Per Jenis Belanja di Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Kode	Program/Kegiatan Utama	Jenis Belanja (Milyar Rp)				Jumlah (Milyar Rp)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	
Tahun 2010		52,694	272,284	4,975	562,415	892,368
'01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	52,694	10,615	-	-	63,309
01.03.03	Program Pengembangan Agribisnis (Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian)	-	5,750	-	17,000	22,750
04.03.04	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	213,000	4,145	450,415	667,560
04.03.08	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	42,920	0,830	95,000	138,750
Tahun 2011						
018.03.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	49,937	325,298	22,754	1.860,721	2.258,710
1761	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	0	31,923	0,194	149,205	181,322
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	0	57,954	0,593	417,125	475,683
1763	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	0	57,322	2,573	1.166,461	1.226,356
1764	Penguatan perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI	0	83,531	1,369	0	84,900
1765	Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	0	17,925	0,203	69,930	88,059

1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	43,616	70,299	17,477	58,000	189,392
1767	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	2,731	3,004	0,266	0	6,000
1768	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	3,591	3,329	0,080	0	7,000
	Rupiah Murni	49,937	320,804	22,724	1.860,721	2.254,186
	PNBP	0	0,145	0,030	0	0,175
	Hibah Luar Negeri	0	4,349	0	0	4,349

4.1 Program

Dalam mewujudkan sasaran strategis pembangunan tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan program tahun 2012 yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

Indikator keberhasilan kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan adalah:

1. Jumlah produksi;
2. Susut hasil produksi; dan
3. Luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terserang OPT dan terkena DPI.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut, maka perlu didukung pencapaian kinerja kegiatan dari masing-masing unit eselon II yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Direktorat Budidaya Serealia: Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
3. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi: Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.
4. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan: Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
5. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan: Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan.
6. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan: Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
7. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH): Kegiatan Pengembangan Metode

Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih.

8. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT): Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Untuk mewujudkan kinerja program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012, komponen prioritas yang terus ditumbuhkembangkan adalah:

- 1) Mengoptimalkan bantuan kepada petani, penangkar benih, pelaku usaha pascapanen, dan lembaga yang mengakar di masyarakat;
- 2) memperkuat brigade produksi (brigade proteksi) dan petugas di lapangan;
- 3) memperkuat fungsi unit pelaksana teknis daerah (BBI, BPSBTPH, dan BPTPH); dan
- 4) memperkuat cadangan bantuan saprodi dalam mengatasi dampak bencana yang timbul.

Tabel 4 Komponen Prioritas Pemberdayaan dan Penguatan Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012

No.	Kegiatan	Komponen Prioritas Pemberdayaan/Penguatan
1.	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	- SLPTT hanya dengan bantuan benih dan LL
		- SLPTT Model Spesifik Lokasi
		- SLPTT Model Peningkatan IP
		- Optimalisasi Pengembangan Areal Tanam (Jagung)
		- Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Pangan Alternatif
2.	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	- SLPTT Kedelai
		- Pengembangan Kedelai Model
		- Pengembangan Kacang Tanah
		- Pengembangan Ubi Kayu
		- Pengembangan Ubi Jalar
3.	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	- Pemberian BLBU
		- Penguatan UPTD BPSBTPH
		- Insentif Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT)
		- Penguatan Balai Benih
		- Pemberdayaan Penangkar
		- Penguatan UPB
4.	Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	- Bantuan Sarana Pasca Panen
		- Survei Susut Hasil Padi
5.	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	- Penguatan P3OPT
		- Gerakan Pengendalian OPT/bantuan pestisida
		- Sekolah Lapangan Pengamatan Hama Terpadu (SLPHT)
		- Sekolah Lapangan Iklim (SLI)
		- Pemberdayaan PPAH
		- Penguatan Lab Pengamatan Hama Terpadu (LPHP)
		- Pemberdayaan THL POPT-PHP
6.	Pengembangan Peramalan Serangan OPT	- Pengembangan Peramalan Serangan OPT
7.	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	- Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih
8	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	- Pemberian Modal Usaha Kepada LM3
		- Penyediaan Cadangan Saprodi Dalam Mengatasi Bencana Alam
		- Pemberian Insentif Mantritani

Salah satu instrumen utama yang menjadi model (*benchmark*) pemberdayaan sebagai gambaran pokok atas keberhasilan program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah **Sekolah Lapangan** meliputi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapangan Iklim (SLI). Ketiga sekolah lapangan ini akan didukung oleh berbagai kegiatan pendukung lain. Sekolah lapangan ini difokuskan pada komoditas padi, jagung dan kedelai. Untuk komoditas lain dilakukan melalui pola pengembangan dengan luasan tertentu (*dem area*). Untuk mendukung pencapaian sasaran produksi komoditas tanaman pangan, sasaran luas tanam SLPTT atau lokasi pengembangan (*dem area*) yang dibiayai melalui APBN TA 2012 terlihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Melalui SLPTT dan Lokasi Pengembangan Melalui APBN TA 2012

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Padi Non Hibrida	2.700.000	2.565.000	64,00	16.416.000
Padi Hibrida	300.000	285.000	77,00	2.195.000
Padi Lahan Kering	500.000	475.000	37,50	1.781.250
Jagung	200.000	190.000	65,00	1.235.000
Kedelai	350.000	332.500	16,00	542.690
Kacang Tanah	150.000	142.500	17,51	268.010
Kacang Hijau	20.000	19.000	13,00	25.260
Ubi Kayu	6.560	6.230	250,00	164.680
Ubi Jalar	10.350	9.830	130,00	139.880

Dalam meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012, alokasi anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Dari keempat jenis belanja diatas, belanja yang merupakan fasilitasi langsung kepada masyarakat adalah belanja bantuan sosial. Berkaitan dengan belanja bantuan sosial dapat dijelaskan bahwa penetapan alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial dikategorikan karena alasan

pemberdayaan sosial dan penanganan bencana. Memperhatikan pengelolaan belanja bantuan sosial, maka penempatan alokasi DIPA disesuaikan dengan karakteristik jenis bantuan sosial yang diberikan. Pola pelaksanaan bantuan sosial dimaksud dilakukan melalui transfer uang dan/atau transfer barang. Hal ini sangat tergantung dengan ketepatan dan keefektifan dalam penyaluran dan pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme pengadaan barang/jasa melalui transfer barang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 termasuk perubahannya. Sedangkan pengadaan barang/jasa melalui transfer uang akan diatur secara rinci melalui pedoman teknis masing-masing. Namun demikian, persyaratan administrasi pengadaan barang/jasa melalui transfer uang adalah membuat kontrak berdasarkan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) antara penerima dan unit kerja pengelola langsung. Apabila ada hal-hal yang berubah dari RUK awal maka dapat dilakukan penyesuaian kontrak dengan melampirkan Berita Acara dan memperoleh persetujuan unit kerja pengelola (satker yang menangani bantuan tersebut).

Untuk memastikan keberhasilan program pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur indikator *outcome* dan indikator *output*. Secara umum, pengukuran indikator kinerja output dilakukan dengan membandingkan capaian fisik dan keuangan terhadap sasaran dan alokasi anggaran yang ditetapkan. Pemantauan hasil keseluruhan atas indikator output dan outcome dilakukan melalui pengumpulan informasi dari dinas kabupaten/kota. Namun demikian, evaluasi pengukuran indikator kinerja *outcome* yang dititikberatkan pada keberhasilan peningkatan produktivitas SLPTT.

4.2 Kegiatan

4.2.1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dikelola oleh Sekretariat Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan, dengan sasaran strategis kegiatan yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya kinerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Indikator Kinerja berupa dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan yang terdiri dari:

- Dokumen Perencanaan
 - (a) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 yang telah direvisi dan disempurnakan;
 - (b) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014;
 - (c) Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan TA 2012;
 - (d) Rencana Kerja Pemerintah;
 - (e) Rencana Kinerja Tahunan;
 - (f) Penetapan Kinerja;
 - (g) Dokumen bahan usulan kegiatan dan anggaran;
 - (h) Rancangan Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pagu sementara;
 - (i) Rancangan Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pagu definitif;
 - (j) Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA/Satuan Rencana Alokasi Anggaran (SRAA);
 - (k) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - (l) Dokumen Monitoring dan Revisi Anggaran;
 - (m) Dokumen Fasilitasi Pertemuan Internasional.
- Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
 - (a) Data tindak lanjut hasil pengawasan pengumpulan data dan penyusunan LHP;
 - (b) Data kerugian negara;
 - (c) Bahan rapat DPR dan Rapim;
 - (d) Data ASEM, ATAP, dan ARAM;
 - (e) Buku ekspor impor;

- (f) Buku statistik tanaman pangan;
 - (g) Buku informasi produksi tanaman pangan;
 - (h) Laporan SAK;
 - (i) Laporan realisasi belanja satker;
 - (j) Laporan realisasi PNBP;
 - (k) Laporan semesteran realisasi penyelesaian kerugian negara;
 - (l) Database rekening satker;
 - (m) Laporan semesteran dan SIMAK BMN;
 - (n) Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - (o) Laporan triwulanan, laporan tengah tahunan, laporan tahunan;
 - (p) Laporan keuangan bulanan dan kunjungan Menteri Pertanian;
 - (q) Laporan SAI dan SIMAKBMN;
 - (r) Laporan pembinaan monev manajemen tanaman pangan;
 - (s) Laporan pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan
 - (t) Tindaklanjut hasil pengawasan dan pelaporan pembangunan tanaman pangan.
- Dokumen keuangan
 - (a) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - (b) SK penetapan pejabat pengelola keuangan;
 - (c) Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB);
 - (d) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran atas beban APBN;
 - (e) Pedoman penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan;
 - (f) Pedoman pengelolaan administrasi dana sektoral;
 - (g) Pedoman administrasi perbendaharaan;
 - (h) Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
 - (i) Laporan penatausahaan asset.
 - Dokumen umum
 - (a) Dokumen Tupoksi dan Ketatalaksanaan;
 - (b) Dokumen kepegawaian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 - (c) Laporan Ketatausahaan dan SDM;
 - (d) Laporan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM;
 - (e) Dokumen peraturan perundang-undangan bidang tanaman pangan.

2) Mengamankan kehilangan hasil produksi akibat bencana alam.

Indikator Kinerja adalah Bantuan penanganan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi.

Pemberian bantuan bencana alam diberikan kepada daerah yang terkena dampak bencana alam seperti banjir, kekeringan, gangguan serangan OPT atau dampak perubahan iklim yang ekstrim sehingga mengancam pengamanan produksi di daerah/lokasi tersebut.

3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan.

Indikator Kinerja adalah Bantuan Modal untuk LM3.

Tujuan pemberian bantuan usaha agribisnis tanaman pangan kepada LM3 dimaksudkan untuk mengembangkan usaha agribisnis yang berdaya saing di LM3 serta meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi LM3. Penguatan kelembagaan LM3 ini dapat dilakukan melalui penerapan beberapa model pemberdayaan dan dalam proses pembelajaran masyarakat secara utuh melalui proses pembelajaran kelompok, serta menginkubasi usaha agribisnis di LM3 melalui fasilitasi bantuan permodalan.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan	Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan. <ul style="list-style-type: none"> - Rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan - Dokumen perencanaan kegiatan/anggaran tanaman pangan - Dokumen pelaksanaan 	8 rancangan 3 dokumen 5 dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	kegiatan/anggaran tanaman pangan - Pedoman manajemen tanaman pangan - Dokumen manajemen tanaman pangan - Peraturan/rancangan peraturan bidang tanaman pangan - Data dan informasi tanaman pangan - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan - Laporan koordinasi, kunjungan kerja, assistensi, pembinaan, monitoring dan evaluasi	9 pedoman 5 dokumen 1 peraturan 8 buku 22 laporan 14 laporan
Mengamankan kehilangan hasil produksi akibat bencana alam	Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi	1 paket
Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan	Bantuan modal untuk LM3	280 LM3

4.2.2 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dikelola oleh Direktorat Budidaya Serealia, dengan sasaran strategis kegiatan adalah mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area. Indikator kinerja yang harus dicapai adalah Produktivitas.

Operasional peningkatan produksi dan produktivitas di lapangan dilakukan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) khususnya untuk padi (non hibrida, hibrida dan lahan kering), dan jagung (hibrida). Penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan instrumen perangsang (stimulus) bagi daerah sekitarnya. Jenis SLPTT yang dikembangkan adalah 1) SLPTT Reguler dimana bantuan yang

diberikan hanya berupa benih, kecuali 1 Ha Laboratorium Lapangan diberikan bantuan full paket, 2) SLPTT Spesifik Lokasi dimana bantuan yang diberikan berupa bantuan full paket (benih, pupuk, dan alsintan), 3) SLPTT Indeks Pertanaman dimana bantuan yang diberikan berupa bantuan full paket (benih, pupuk, dan alsintan).

Kriteria penerima SLPTT ini difokuskan kepada petani/kelompok tani yang memiliki produktivitas yang lebih rendah dari produktivitas kabupaten. Penerapan pola ini diharapkan terbina kawasan-kawasan andalan, yang berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya.

Dalam setiap 25 ha areal SLPTT padi non hibrida, 25 ha areal SLPTT padi non hibrida spesifik lokasi, 25 ha areal SLPTT padi non hibrida peningkatan IP, 10 ha areal SLPTT padi hibrida, 10 ha areal SLPTT padi hibrida spesifik lokasi, 25 ha areal SLPTT padi lahan kering, dan 15 ha areal SLPTT jagung hibrida. Masing-masing ditempatkan 1 unit laboratorium lapangan (LL) dengan luasan 1 Ha.

Pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia dilaksanakan juga fasilitasi kemitraan pangan alternatif dan upaya pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi serealia. Tabel 7 berikut ini menggambarkan rencana kinerja tahunan Direktorat Budidaya Serealia Tahun 2012.

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Budidaya Serealia Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL)	Luas SLPTT Padi meningkatkan produktivitas <ul style="list-style-type: none"> - Padi non hibrida - Padi non hibrida spesifik lokasi - Padi non hibrida peningkatan IP - Padi hibrida 	2.651.700 ha 33.550 ha 14.750 ha 290.700 ha

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> - Padi hibrida spesifik lokasi - Padi lahan kering 	9.300 ha 500.000 ha
	Luas SLPTT Jagung meningkatkan produktivitas <ul style="list-style-type: none"> - Jagung hibrida 	200.000 ha

4.2.3 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dikelola oleh Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area. Indikator kinerjanya adalah Produktivitas.

Dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, maka dilakukan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) serta pengembangan kedelai model.

Dalam 10 ha areal SLPTT kedelai ditempatkan 1 unit laboratorium lapangan (LL) dengan luasan 1 Ha. Sedangkan pada pengembangan kedelai model dengan luasan 1 Ha. Laboratorium Lapangan memperoleh bantuan Benih dan Pupuk (NPK, Urea dan Organik) serta melakukan pertemuan petani pelaksana SL. Selain itu pada areal SL-PTT dialokasikan anggaran untuk ubinan setiap luasan 100 ha mendapat 1 (satu) unit sampling ubinan. Sementara itu areal SL Non Laboratorium Lapangan hanya mendapat bantuan benih VUB. Untuk menjamin keberhasilan penerapan di lapangan perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT, PBT dan Mantri Tani.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2012 sebagaimana tabel 8 berikut.

Tabel 8. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2012

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL)	Luas SLPTT Kedelai meningkatkan produktivitas <ul style="list-style-type: none"> - SLPTT Kedelai - Pengembangan Kedelai Model 	350.000 ha 2.094 ha
	Luas pengembangan aneka kacang dan umbi lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kacang Tanah - Pengembangan Ubi Kayu - Pengembangan Ubi Jalar - Ubinan SLPTT Kedelai 	100 ha 300 ha 850 ha 3.500 ha

5. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dikelola oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah 1) meningkatkan produksi dan kualitas produksi pertanaman; 2) meningkatnya penggunaan benih unggul sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan mutu hasil produksi.

Indikator kinerja utama: 1) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT; dan 2) Pemberdayaan Penangkaran Benih.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan yaitu melalui penggunaan benih varietas unggul bermutu bagi petani, mempermudah akses petani terhadap benih varietas unggul bermutu, serta penggunaan sarana produksi yang dilakukan melalui kegiatan: operasional operasional UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPSBTPH); operasional Balai Benih Induk (BBI); pemberdayaan penangkar; pembangunan dan

optimalisasi UPB; pembinaan, pengawalan, dan monitoring evaluasi pembangunan penangkaran benih; pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU); pembinaan, pengawalan, monitoring evaluasi BLBU, subsidi, dan Cadangan Benih Nasional (CBN); serta pemberian insentif petugas pengawas benih tanaman (PBT).

Bantuan langsung benih unggul dialokasikan dengan rincian sebagai berikut: bantuan benih padi non hibrida, padi lahan kering, padi hibrida, jagung hibrida, dan kedelai diperuntukkan bagi kegiatan SLPTT dan non SLPTT. Selain itu, dialokasikan untuk mendukung pengembangan kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar (Direktif Presiden).

Selain itu, pengembangan perbenihan diharapkan dapat memperbaiki sistem produksi benih aneka kacang dan umbi (kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, dan ubijalar).

Penguatan kelembagaan perbenihan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dimaksudkan untuk memperlancar penyediaan benih varietas unggul bermutu komoditas tanaman pangan.

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) diberikan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas terutama di lokasi SL-PTT, meringankan beban petani serta meningkatkan kesadaran penggunaan benih varietas unggul bermutu, sehingga dapat meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas. Rencana alokasi BLBU tahun anggaran 2012 difokuskan pada lokasi-lokasi yang melaksanakan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT).

Selain bantuan langsung benih unggul, pemerintah terus mengupayakan pemberian subsidi harga benih dan cadangan benih nasional. Subsidi harga benih dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga benih di pasar bebas, meringankan beban petani serta meningkatkan ketersediaan benih dan penggunaan benih varietas unggul bermutu bagi kelompok tani/petani. Cadangan Benih Nasional (CBN) dimaksudkan sebagai upaya pemulihan dari pertanaman kelompok tani/petani yang terkena bencana alam (banjir, kekeringan, dsb) serta eksplosi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Tabel 9. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya produksi dan kualitas produk pertanaman	Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT - Padi Non Hibrida - Padi Hibrida - Padi Lahan Kering - Jagung Hibrida - Kedelai	68.000 ton 5.000 ton 13.000 ton 3.000 ton 14.000 ton
Meningkatnya penggunaan benih unggul sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan mutu hasil produksi	Pemberdayaan Penangkaran Benih - Padi - Jagung - Kedelai	10.000 ha 700 ha 2.500 ha

4.2.5 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan dikelola oleh Direktorat Budidaya Pascapanen.

Sasaran strategis yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen (susut).

Indikator kinerja utama: 1) Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen dan 2) Pengembangan, pembinaan dan pengawalan.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen	Jumlah bantuan sarana pascapanen - Padi - Jagung - Kedelai - Ubi Kayu - Ubi Jalar	442 paket 15 paket 25 paket 12 paket 10 aket

4.2.6 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI dikelola oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah mengendalikan luas serangan OPT dan terkena DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.

Indikator kinerja utama: 1) SLPHT dan SLI dan 2) Jumlah Bantuan Sarana Pengendalian OPT.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman yang disebabkan oleh OPT dan DPI dengan hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah: (1) menguatnya sistem pengamatan dan pengendalian dini, (2) meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, (3) menguatnya peran dan fungsi kelembagaan perlindungan, (4) menguatnya penerapan teknologi pengendalian OPT dan adaptasi DPI, (5) meningkatnya gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI, (6) tersedianya sarana pengendalian OPT, dan (7) menguatnya database perlindungan tanaman pangan dan SIM OPT.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Mengendalikan luas serangan OPT dan terkena DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan	SLPTT SLI Jumlah bantuan sarana pengendalian OPT	1.950 unit 130 unit 1 paket

4.2.7 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih

Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih dikelola oleh Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH).

Sasaran strategis kegiatan ini adalah: 1) meningkatnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan; 2) mengetahui unjuk kerja suatu laboratorium pengujian mutu benih; dan 3) mengetahui mutu benih yang beredar di pasaran.

Indikator kinerja utama: 1) Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu; 2) Jumlah Laboratorium peserta uji profisiensi; dan 3) Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar.

Untuk memperoleh hasil uji yang akurat, pemilihan metode merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Metode yang dipergunakan merupakan standar yang dipublikasikan secara internasional/nasional yang terjamin validitasnya. Dengan adanya berbagai macam keterbatasan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, maka perlu dilakukan penyesuaian atau modifikasi sehingga pengembangan metode yang disusun dapat bermanfaat bagi perkembangan perbenihan di Indonesia. Dengan adanya pengembangan metode ini maka akan diperoleh metode baru atau

metode pengujian yang sudah dimodifikasi yang mengacu pada *ISTA Rules* dan referensi lainnya yang mutakhir.

Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah mengembangkan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem sertifikasi untuk mendukung sistem perbenihan tanaman pangan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012 dapat di lihat pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan	Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu	1 paket
Mengetahui unjuk kerja suatu laboratorium pengujian mutu benih	Jumlah Laboratorium peserta uji profisiensi	1 paket
Mengetahui mutu benih yang beredar di pasaran	Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar	1 paket

4.2.8 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dikelola oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT).

Sasaran strategis kegiatan ini adalah 1) meningkatnya kinerja pengamatan serangan OPT dan 2) meningkatnya kinerja teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.

Indikator kinerja utama: 1) Jumlah informasi peramalan serangan OPT dan 2) jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.

Kegiatan pengembangan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan dimaksudkan agar tersedia informasi dan model peralaman OPT yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura, seperti: tersusunnya model dan metodologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT; tersebarnya informasi peramalan serangan OPT padi, jagung dan kedelai; serta dilaksanakannya operasional BBPPOPT untuk memperlancar setiap kegiatan sehingga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan tahun 2012 seperti tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kinerja pengamatan serangan OPT	Jumlah informasi peramalan serangan OPT	42 paket
Meningkatnya kinerja teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.	Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.	12 model

Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 dapat di lihat pada matrik di bawah ini.

**MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2012**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

**Unit Eselon I Kementerian/Lembaga: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun : 2012**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan nasional	Peningkatan jumlah produksi. - Produksi Padi - Produksi Jagung - Produksi Kedelai - Produksi Kacang Tanah - Produksi Kacang Hijau - Produksi Ubi Kayu - Produksi Ubi Jalar	72.026.235 Ton GKP 24.000.000 Ton PK 1.900.000 Ton BK 1.100.000 Ton BK 390.000 Ton BK 25.000.000 Ton umbi basah 2.300.000 Ton umbi basah
Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan nasional	Luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terserang OPT dan terkena DPI	dibawah 5%
Mengamankan kehilangan (susut) hasil produksi	Susut Hasil Produksi - Susut hasil produksi Padi - Susut hasil produksi Jagung - Susut hasil produksi Kedelai	1,53 % 0,25 % 0,50 %

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2012

NO	PROVINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1.	N. ACEH D.	381.291	383.099	52,08	1.995.040
2.	SUMUT	782.173	770.110	52,24	4.022.675
3.	SUMBAR	477.034	475.529	51,52	2.450.000
4.	RIAU	155.033	149.669	40,88	611.780
5.	JAMBI	169.401	165.540	42,78	708.145
6.	SUMSEL	822.693	794.227	47,21	3.749.670
7.	BENGKULU	132.324	132.745	39,85	529.050
8.	LAMPUNG	627.399	630.691	49,83	3.142.530
9.	BABEL	13.994	8.510	48,00	40.850
10.	KEP RIAU	410	395	50,74	2.006
	SUMATERA	3.561.752	3.510.515	49,14	17.251.746
11.	DKI JAKARTA	1.967	1.899	54,20	10.290
12.	JABAR	2.039.148	1.978.594	62,17	12.300.000
13.	JATENG	1.933.975	1.767.059	59,27	10.472.980
14.	DI JOGJA	152.206	148.940	58,95	877.950
15.	JATIM	2.068.796	1.967.216	62,58	12.310.000
16.	BANTEN	412.079	407.821	52,22	2.129.765
	JAWA	6.608.171	6.271.528	60,75	38.100.985
17.	BALI	156.028	151.629	56,66	859.080
18.	N.T.B.	432.691	437.720	50,12	2.194.040
19.	N.T.T.	209.708	195.452	32,47	634.705
	BALI & N.T	798.426	784.801	46,99	3.687.825
20.	KALBAR	457.602	443.769	33,08	1.468.145
21.	KALTENG	229.281	221.348	28,88	639.255
22.	KALSEL	515.078	497.256	40,98	2.037.660
23.	KALTIM	164.844	159.141	39,32	625.765
	KALIMANTAN	1.366.805	1.321.514	36,10	4.770.824
24.	SULUT	134.244	134.599	47,65	641.385
25.	SULTENG	241.365	233.014	46,55	1.084.570
26.	SULSEL	957.809	924.669	53,14	4.913.600
27.	SULTRA	127.679	126.262	40,33	509.250
28.	GORONTALO	60.272	68.186	49,24	335.760
29.	SUL BARAT	89.016	85.936	47,54	408.550
	SULAWESI	1.610.386	1.572.666	50,19	7.893.115
30.	MALUKU	20.091	19.396	47,59	92.310
31.	MALUKU UT	18.003	17.380	38,74	67.325
32.	PAPUA BARAT	10.703	10.333	45,07	46.568
33.	PAPUA	29.270	30.257	38,19	115.538
	MLK & PAPUA	78.066	77.365	41,59	321.740
	LUAR JAWA	7.415.434	7.266.860	46,68	33.925.249
	INDONESIA	14.026.771	13.556.865	53,13	72.026.235

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2012

NO	PROPINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1.	ACEH	53.491	51.088	37,82	193.200
2.	SUMUT	269.363	257.260	63,64	1.637.194
3.	SUMBAR	77.467	73.986	63,51	469.868
4.	RIAU	30.657	29.280	31,80	93.118
5.	JAMBI	13.072	12.484	42,91	53.568
6.	SUMSEL	35.235	33.652	39,98	134.529
7.	BENGKULU	38.270	36.551	33,70	123.168
8.	LAMPUNG	494.268	472.060	56,95	2.688.556
9.	BABEL	1.099	1.049	33,69	3.535
10.	KEP RIAU	711	679	27,13	1.844
	SUMATERA	1.013.633	968.091	55,77	5.398.579
11.	DKI JAKARTA	30	29	33,97	98
12.	JABAR	187.059	178.654	55,62	993.600
13.	JATENG	745.880	712.368	54,23	3.863.499
14.	DI JOGJA	80.083	76.485	41,10	314.375
15.	JATIM	1.361.228	1.300.068	54,30	7.059.463
16.	BANTEN	17.591	16.800	36,49	61.297
	JAWA	2.391.871	2.284.405	53,81	12.292.332
17.	BALI	31.277	29.872	34,08	101.799
18.	N.T.B.	97.572	93.189	43,31	403.636
19.	N.T.T.	353.910	338.009	32,27	1.090.909
	BALI & N.T	482.760	461.069	34,62	1.596.345
20.	KALBAR	54.096	51.665	46,45	240.000
21.	KALTENG	3.599	3.437	31,42	10.800
22.	KALSEL	27.945	26.689	53,88	143.804
23.	KALTIM	6.661	6.362	21,91	13.940
	KALIMANTAN	92.300	88.153	46,34	408.543
24.	SULUT	174.994	167.131	39,41	658.737
25.	SULTENG	52.868	50.492	42,67	215.441
26.	SULSEL	375.192	358.334	56,17	2.012.640
27.	SULTRA	45.019	42.997	38,77	166.684
28.	GORONTALO	192.497	183.849	58,09	1.068.000
29.	SUL BARAT	27.544	26.306	46,92	123.442
	SULAWESI	868.114	829.110	51,20	4.244.944
30.	MALUKU	9.160	8.748	26,30	23.008
31.	MALUKU UT	11.238	10.733	24,82	26.640
32.	IRJA BARAT	4.614	4.407	18,91	8.332
33.	PAPUA	748	714	17,87	1.276
	MLK & PAPUA	25.760	24.602	24,09	59.257
	LUAR JAWA	2.482.566	2.371.025	49,38	11.707.668
	INDONESIA	4.874.437	4.655.430	51,55	24.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 3. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Tahun 2012

NO	PROPINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1.	ACEH	121.900	117.098	14,89	174.400
2.	SUMUT	25.900	24.796	13,87	34.400
3.	SUMBAR	10.000	8.757	15,30	13.400
4.	RIAU	12.000	10.620	13,47	14.300
5.	JAMBI	16.000	17.718	13,77	24.400
6.	SUMSEL	18.000	17.515	15,30	26.800
7.	BENGGULU	11.500	11.009	13,26	14.600
8.	LAMPUNG	27.700	23.498	13,87	32.600
9.	BABEL	-	-	-	-
10.	KEP RIAU	-	-	-	-
	SUMATERA	243.000	231.012	14,50	334.900
11.	DKI JAKARTA	-	-	-	-
12.	JABAR	79.700	78.675	15,91	125.200
13.	JATENG	197.900	189.013	16,32	308.500
14.	DI JOGJA	45.000	42.937	15,30	65.700
15.	JATIM	371.000	364.539	15,30	557.800
16.	BANTEN	30.000	26.249	15,51	40.700
	JAWA	723.600	701.413	15,65	1.097.900
17.	BALI	10.000	13.397	15,30	20.500
18.	N.T.B.	158.400	135.156	14,38	194.400
19.	N.T.T.	7.000	4.977	13,26	6.600
	BALI & N.T	175.400	153.530	42,95	221.500
20.	KALBAR	5.500	4.159	13,47	5.600
21.	KALTENG	20.800	16.387	13,67	22.400
22.	KALSEL	9.400	7.462	13,67	10.200
23.	KALTIM	12.000	7.946	13,47	10.700
	KALIMANTAN	47.700	35.954	13,60	48.900
24.	SULUT	12.600	12.034	14,79	17.800
25.	SULTENG	7.800	9.803	14,79	14.500
26.	SULSEL	54.200	57.123	16,53	94.400
27.	SULTRA	14.300	13.649	13,26	18.100
28.	GORONTALO	9.300	6.896	14,79	10.200
29.	SUL BARAT	8.700	13.319	14,79	19.700
	SULAWESI	106.900	112.823	15,48	174.700
30.	MALUKU	3.000	3.119	13,47	4.200
31.	MALUKU UT	2.900	3.342	13,47	4.500
32.	IRJA BARAT	3.000	3.620	13,26	4.800
33.	PAPUA	6.500	6.485	13,26	8.600
	MLK & PAPUA	15.400	16.566	13,34	22.100
	LUAR JAWA	588.400	549.885	14,59	802.100
	INDONESIA	1.312.000	1.250.000	15,20	1.900.000

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 4. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2012

NO	PROVINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1.	ACEH	7.142	6.802	14,26	9.699
2.	SUMUT	19.681	18.743	13,33	24.977
3.	SUMBAR	9.605	9.147	14,52	13.281
4.	RIAU	4.248	4.046	10,89	4.406
5.	JAMBI	2.346	2.234	13,48	3.012
6.	SUMSEL	6.246	5.949	14,36	8.544
7.	BENGGULU	9.530	9.076	10,73	9.742
8.	LAMPUNG	20.668	19.684	14,00	27.557
9.	BABEL	597	569	11,04	628
10.	KEP RIAU	201	191	10,89	208
	SUMATERA	80.264	76.441	13,35	102.054
11.	DKI JAKARTA	25	24	12,08	29
12.	JABAR	79.228	75.453	16,54	124.805
13.	JATENG	157.617	150.114	15,24	228.839
14.	DI JOGJA	78.079	74.360	11,87	88.250
15.	JATIM	217.015	206.677	13,35	275.843
16.	BANTEN	16.649	15.856	16,07	25.487
	JAWA	548.613	522.484	14,23	743.253
17.	BALI	16.075	15.309	14,52	22.227
18.	N.T.B.	36.743	34.993	14,52	50.804
19.	N.T.T.	27.557	26.245	13,22	34.701
	BALI & N.T	80.375	76.547	14,07	107.732
20.	KALBAR	2.411	2.296	12,45	2.858
21.	KALTENG	2.067	1.968	12,65	2.490
22.	KALSEL	18.372	17.496	12,55	21.955
23.	KALTIM	3.100	2.953	12,44	3.674
	KALIMANTAN	25.950	24.713	12,53	30.977
24.	SULUT	8.612	8.201	14,26	11.695
25.	SULTENG	6.889	6.561	18,15	11.907
26.	SULSEL	44.781	42.648	14,00	59.706
27.	SULTRA	9.760	9.295	9,78	9.090
28.	GORONTALO	2.756	2.624	12,96	3.402
29.	SUL BARAT	1.608	1.531	15,02	2.300
	SULAWESI	74.406	70.860	13,84	98.100
30.	MALUKU	4.019	3.827	12,76	4.882
31.	MALUKU UT	5.741	5.468	12,44	6.804
32.	IRJA BARAT	2.187	2.078	11,82	2.456
33.	PAPUA	3.445	3.282	11,40	3.742
	MLK & PAPUA	15.392	14.655	12,20	17.884
	LUAR JAWA	276.387	263.216	13,55	356.747
	INDONESIA	825.000	785.700	14,00	1.100.000

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 5. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2012

NO	PROVINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1.	ACEH	2.955	2.808	12,67	3.556
2.	SUMUT	6.099	5.794	12,13	7.031
3.	SUMBAR	1.374	1.305	13,28	1.734
4.	RIAU	2.079	1.975	12,11	2.393
5.	JAMBI	616	585	12,08	706
6.	SUMSEL	3.115	2.959	15,32	4.532
7.	BENGKULU	1.797	1.707	10,87	1.855
8.	LAMPUNG	5.579	5.300	10,14	5.376
9.	BABEL	-	-	-	-
10.	KEP RIAU	1	1	10,26	1
	SUMATERA	23.615	22.435	12,12	27.184
11.	DKI JAKARTA	-	-	-	-
12.	JABAR	13.495	12.821	12,17	15.600
13.	JATENG	99.531	94.576	12,36	116.874
14.	DI JOGJA	1.141	1.084	7,29	791
15.	JATIM	77.774	73.888	12,63	93.284
16.	BANTEN	2.680	2.546	10,14	2.582
	JAWA	194.620	184.914	12,39	229.130
17.	BALI	1.245	1.183	10,69	1.265
18.	N.T.B.	50.494	47.971	11,21	53.757
19.	N.T.T.	30.073	28.570	9,26	26.457
	BALI & N.T	81.812	77.724	10,48	81.478
20.	KALBAR	2.074	1.970	8,02	1.581
21.	KALTENG	399	379	9,45	358
22.	KALSEL	1.587	1.507	11,75	1.771
23.	KALTIM	1.117	1.061	12,02	1.275
	KALIMANTAN	5.177	4.918	10,14	4.986
24.	SULUT	1.883	1.789	15,38	2.751
25.	SULTENG	1.602	1.522	9,00	1.370
26.	SULSEL	26.962	25.614	13,89	35.574
27.	SULTRA	2.373	2.254	9,12	2.055
28.	GORONTALO	501	476	13,51	643
29.	SUL BARAT	960	912	15,02	1.370
	SULAWESI	34.281	32.568	13,44	43.764
30.	MALUKU	661	629	11,90	748
31.	MALUKU UT	418	397	12,21	485
32.	IRJA BARAT	819	778	11,51	896
33.	PAPUA	1.198	1.138	11,67	1.328
	MLK & PAPUA	3.095	2.942	11,75	3.457
	LUAR JAWA	147.980	140.586	11,44	160.870
	INDONESIA	342.600	325.500	11,98	390.000

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 6. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2012

NO	PROVINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1.	ACEH	4.113	3.917	132	51.555
2.	SUMUT	45.803	43.622	207	902.890
3.	SUMBAR	6.114	5.823	207	120.516
4.	RIAU	6.670	6.352	117	74.164
5.	JAMBI	3.112	2.964	144	42.790
6.	SUMSEL	14.729	14.027	160	224.829
7.	BENGKULU	7.781	7.411	124	92.031
8.	LAMPUNG	352.374	335.592	254	8.533.351
9.	BABEL	2.001	1.906	150	28.519
10.	KEP RIAU	1.334	1.270	113	14.293
	SUMATERA	444.030	422.883	238	10.084.940
11.	DKI JAKARTA	56	53	123	652
12.	JABAR	124.498	118.569	197	2.335.266
13.	JATENG	213.425	203.261	185	3.768.878
14.	DI JOGJA	71.142	67.754	159	1.078.749
15.	JATIM	253.442	241.372	170	4.092.503
16.	BANTEN	13.339	12.704	149	188.781
	JAWA	675.902	643.711	178	11.464.828
17.	BALI	13.117	12.492	155	193.590
18.	N.T.B.	9.449	8.999	127	114.617
19.	N.T.T.	94.485	89.985	113	1.012.451
	BALI & N.T	117.050	111.476	118	1.320.658
20.	KALBAR	18.119	17.256	153	263.754
21.	KALTENG	9.671	9.210	124	114.381
22.	KALSEL	9.560	9.104	155	141.091
23.	KALTIM	8.893	8.469	163	138.439
	KALIMANTAN	46.242	44.040	149	657.666
24.	SULUT	6.892	6.564	138	90.570
25.	SULTENG	5.002	4.764	171	81.412
26.	SULSEL	33.570	31.971	179	573.512
27.	SULTRA	14.895	14.186	175	248.449
28.	GORONTALO	1.667	1.588	127	20.227
29.	SUL BARAT	4.669	4.446	149	66.073
	SULAWESI	66.695	63.519	170	1.080.243
30.	MALUKU	12.227	11.645	136	158.216
31.	MALUKU UT	12.227	11.645	128	149.564
32.	IRJA BARAT	2.779	2.647	120	31.744
33.	PAPUA	4.446	4.235	123	52.140
	MLK & PAPUA	31.680	30.171	130	391.664
	LUAR JAWA	705.698	672.089	201	13.535.172
	INDONESIA	1.381.600	1.315.800	190	25.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran 7. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2012

NO	PROVINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1.	N. ACEH D.	3.395	3.226	110	35.385
2.	SUMUT	17.769	16.885	110	185.179
3.	SUMBAR	4.446	4.225	123	51.897
4.	RIAU	1.440	1.368	89	12.149
5.	JAMBI	2.498	2.373	95	22.646
6.	SUMSEL	2.500	2.375	73	17.456
7.	BENGKULU	4.668	4.435	106	47.179
8.	LAMPUNG	4.640	4.410	110	48.359
9.	BABEL	666	633	93	5.897
10.	KEP RIAU	333	316	93	2.949
	SUMATERA	42.355	40.247	107	429.097
11.	DKI JAKARTA	-	-	-	-
12.	JABAR	34.489	32.773	139	456.462
13.	JATENG	12.897	12.256	141	173.385
14.	DI JOGJA	514	489	121	5.897
15.	JATIM	16.720	15.888	121	191.667
16.	BANTEN	3.155	2.998	124	37.154
	JAWA	67.776	64.403	134	864.564
17.	BALI	6.288	5.975	128	76.667
18.	N.T.B.	1.638	1.557	125	19.462
19.	N.T.T.	19.524	18.552	95	176.923
	BALI & N.T	27.450	26.084	105	273.051
20.	KALBAR	878	835	92	7.667
21.	KALTENG	1.582	1.503	91	13.682
22.	KALSEL	1.495	1.421	112	15.923
23.	KALTIM	2.549	2.422	105	25.359
	KALIMANTAN	6.505	6.181	101	62.631
24.	SULUT	3.500	3.326	106	35.385
25.	SULTENG	2.333	2.217	106	23.590
26.	SULSEL	8.231	7.822	121	94.359
27.	SULTRA	2.291	2.177	91	19.815
28.	GORONTALO	608	578	102	5.897
29.	SUL BARAT	596	566	104	5.897
	SULAWESI	17.560	16.686	111	184.944
30.	MALUKU	1.552	1.475	100	14.744
31.	MALUKU UT	3.386	3.218	99	31.846
32.	IRJA BARAT	3.112	2.958	104	30.903
33.	PAPUA	37.304	35.448	115	408.221
	MLK & PAPUA	45.355	43.099	113	485.713
	LUAR JAWA	139.224	132.297	109	1.435.436
	INDONESIA	207.000	196.700	117	2.300.000

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

**Lampiran 8. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010, tanggal 14 Oktober 2010)**

No.	Unit Eselon II	Unit Eselon III
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2.	Direktorat Budidaya Serealia	1. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa 2. Subdirektorat Padi tadah Hujan dan lahan Kering 3. Subdirektorat Jagung 4. Subdirektorat Serealia Lain 5. Subbagian Tata Usaha
3.	Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	1. Subdirektorat Kedelai 2. Subdirektorat Ubi Kayu 3. Subdirektorat Aneka Kacang 4. Subdirektorat Aneka Umbi 5. Subbagian Tata Usaha
4.	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	1. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 2. Subdirektorat Produksi Benih Serealia 3. Subdirektorat Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 4. Subdirektorat Kelembagaan Benih 5. Subbagian Tata Usaha
5.	Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan	1. Subdirektorat Padi 2. Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain 3. Subdirektorat Kedelai dan Aneka Kacang 4. Subdirektorat Aneka Umbi 5. Subbagian Tata Usaha
6.	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	1. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan 2. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim 3. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

		<ol style="list-style-type: none">4. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu5. Subbagian Tata Usaha
7.	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Umum2. Kepala Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium
8.	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Umum2. Kepala Bidang Program dan Evaluasi3. Kepala Bidang Pelayanan Teknik, Informasi dan Dokumentasi
9.	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	

**Lampiran 9. Daftar Komoditi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan
(Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/
PD.310/9/2006, tanggal 12 September 2006)**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN		
Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006		
Tanggal : 12 September 2006		
DAFTAR KOMODITI TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN		
NO.	NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
I	Padi	<i>Oryza Sativa</i>
II	Palawija	
1	Gandum	<i>Triticum spp</i>
2	Hotong	<i>Setaria Calica L</i>
3	Jagung	<i>Zea mays</i>
4	Juwawut	<i>Pennisetum hyphoides</i>
5	Shorgum	<i>Shorgum spp</i>
III	Kacang-kacangan dan Umbi-umbian	
1	Gadung	<i>Dioscorea hispida dennst</i>
2	Ganyong	<i>Cannaedulis kar</i>
3	Garut	<i>Meranta arundinaceae</i>
4	Gembili	<i>Dioscorea aculeata L</i>
5	Illes-iles	<i>Taccapalmata</i>
6	Kacang Gude / Hiris	<i>Cajanuscajakan</i>
7	Kacang Hijau	<i>Phaseolus vulgaris</i>
8	Kacang Rawai	<i>Gayanus spp</i>
9	Kacang Tanah	<i>Arachis spp</i>
10	Kacang Tunggak	<i>Vigna unguiculata</i>
11	Kedelai	<i>Glycine spp</i>
12	Kimpul	<i>Xantosoma violacium schott</i>
13	Kacang Merah	<i>Vigna angularis</i>
14	Kacang Nagara	<i>Vigna cilindrica</i>
15	Kacang Bogor	<i>Vigna subterranea L</i>
16	Kacang Karo Benguk	<i>Mucuna pruriens</i>
17	Kacang Komak	<i>Lablab purpureus L Sweet</i>
18	Kacang Babi	<i>Ficia faba L</i>
19	Koro Pedang	<i>Cana valia gladia</i>
20	Partelum spp	
21	Suweg	<i>Amorphophallus campanulatus b.l</i>
22	Talas Padang	<i>Colocasia gigantea Hook</i>
23	Talas Jepang	<i>Satoimo</i>
24	Talas Bogor	<i>Colocasia esculenta l.schot</i>
25	Talas Belitung	<i>Xantosoma saggitifolium l.</i>
26	Tanaman Penutup Tanah	<i>Dolichos spp</i>
27	Tanaman Penutup Tanah	<i>Crotalaria spp</i>
28	Ubi Jalar	<i>Ipomea spp</i>
29	Ubi Kayu	<i>Manihoi spp</i>
30	Ubi Saut	<i>Ubi saut</i>